

## BAB II

### KAJIAN KONSEPTUAL

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Studi pendahuluan adalah suatu usaha untuk mempelajari masalah penelitian sebelum penelitian benar-benar dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga memiliki tujuan guna mendapatkan bahan perbandingan dan pedoman dalam menyusun sebuah penelitian (Rifa'i Abubakar, 2021). Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

##### 2.1.1 Sri Sulistijaningsih. 2020. Motivasi Narapidana Perempuan Lapas Perempuan

Kelas IIA Kota Bandung dalam Mengikuti Program Pembinaan Kemandirian.

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi yang mendorong WBPP mengikuti program pembinaan kemandirian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori motivasi menurut Vroom (Kreitner & Kinicki 2007:247). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, motivasi warga binaan pemsarakatan perempuan di Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Bandung dalam mengikuti program pembinaan, yakni ingin mengembangkan keterampilan setelah bebas dan dapat menciptakan usaha sebagai mata pencaharian.

##### 2.1.2 Lingga Adi Sektiawan. 2021. Implementasi Pembinaan Kemandirian Bagi

Narapidana Perempuan di Lapas Kelas II B Ngawi. Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh solusi, yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkatkan produktivitas barang maupun minat dari narapidana perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Saroso tentang pembinaan WBPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk membina dan mendidik WBPP. Tujuan dilaksanakannya program pembinaan tersebut adalah untuk memberikan bekal kepada WBPP setelah bebas dari masa pidananya para WBPP tersebut dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat serta tidak mengulangi kembali perbuatan kejahatan atau yang melanggar hukum pidana.

**2.1.3 Hendra Ekaputra. 2020. Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Universitas Borobudur**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *snowball sampling*. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bimbingan kerja atau karir menurut Murray (1983). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program latihan kerja bagi warga binaan untuk mendorong kecakapan hidup bagi warga binaan haruslah diberikan jaminan hukum sebagai program wajib bagi warga binaan, sehingga tujuan yang diharapkan dalam sistem pemasyarakatan dapat berhasil.

Matriks 2. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1	Motivasi Narapidana Perempuan Lapas	Kualitatif	Motivasi yang dimiliki WBP tinggi	Metode penelitian kualitatif. Subjek	Variabel bebas penelitian ini adalah

No	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Perempuan Kelas II A Bandung dalam Mengikuti Program Pembinaan Kemandirian oleh Sri Sulistijaningsih			penelitian adalah WBP	motivasi WBP
2	Implementasi Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Perempuan di Lapas Kelas II B Ngawi oleh Lingga Adi Sektiawan	Kualitatif	Pembinaan Kemandirian Bagi WBP di Lapas Kelas II B Ngawi terimplementasikan dengan baik	Metode penelitian kualitatif.  Subjek penelitian adalah WBP	Lokasi penelitian di Lapas Kelas II B Ngawi.  Variabel bebas penelitian ini adalah pembinaan kemandirian
3	Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Hendra Ekaputra	Kualitatif	Pengembangan Kecakapan Hidup WBP di Lapas terlaksana dengan baik	Metode penelitian, yakni kualitatif. Subjek penelitian adalah WBP. Variabel bebas yakni <i>life skill</i>	Lokasi penelitian di beberapa Lembaga Masyarakat.

Berdasarkan Matriks 2.1 diketahui bahwa relevansi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam hal meneliti pembinaan kemandirian warga binaan yang berkaitan dengan pengembangan kecakapan hidup (*life skill*). Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian saat ini adalah sebagai referensi bagi peneliti untuk mengembangkan topik yang lebih menarik dan sebagai pemikiran dasar penelitian. Hal yang menjadi keunggulan penelitian saat ini adalah memiliki unsur kebaruan

(*novelty*). Penelitian yang akan dilaksanakan nantinya akan menyusun rekomendasi program terkait pengembangan *life skill* di Lembaga Pemasarakatan Perempuan. Topik pengembangan *life skill* di Lembaga Pemasarakatan Perempuan belum banyak diteliti sebelumnya, karena pada umumnya penelitian terkait pengembangan *life skill* dilakukan di lembaga pendidikan formal dan non formal.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

Teori-teori yang relevan dengan penelitian pengembangan *life skill* warga binaan pemsarakatan akan dijelaskan sebagai berikut:

### **2.2.1 Kajian tentang *Life Skill***

Kajian tentang *life skill* di dalamnya akan membahas tentang definisi, aspek-aspek, misi dan prinsip pendidikan *life skill*, sasaran, dan tujuan pendidikan *life skill*.

#### **2.2.1.1 Definisi *Life Skill***

Menurut Broling, (1989:17) menjelaskan bahwa “*Life skill* dapat dinyatakan sebagai kecakapan untuk hidup”. Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar di tempat kerja, dan mempergunakan teknologi.”

#### **2.2.1.2 Aspek-aspek *Life Skill***

Menurut Broling dalam Anwar (2015:32) mengelompokkan *life skill* menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama, kecakapan hidup sehari-hari (*daily living skill*), antara lain meliputi pengelolaan rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan makanan-gizi, pengelolaan pakaian, kesadaran pribadi warga negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi, dan kesadaran lingkungan. Kedua, kecakapan hidup sosial/pribadi (*personal/social skill*), antara lain meliputi kesadaran diri (minat, bakat,

sikap, kecakapan), percaya diri, komunikasi dengan orang lain, tanggung rasa dan kepedulian pada sesama, hubungan antar personal, pemahaman masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, kemandirian dan kepemimpinan. Ketiga, kecakapan hidup bekerja (*vocational skill*), meliputi kecakapan memilih pekerjaan, perencanaan kerja, persiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, pengusaha kompetensi, menjalankan suatu profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan, kemampuan menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang dan jasa.

### **2.2.1.3 Misi dan Prinsip Pendidikan *Life Skill***

*Life skill* memiliki misi untuk meningkatkan kualitas keterampilan, kecakapan hidup dan profesionalitas, bagi anggota masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meraih kesejahteraan jasmani dan rohani, dengan menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat dan untuk meningkatkan daya saing bangsa di era global. Prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) menurut (Anwar, 2015:5) adalah sebagai berikut:

Pertama, tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku, kedua tidak mengubah kurikulum yang berlaku, ketiga pembelajaran menggunakan prinsip empat pilar, yaitu: belajar untuk tahu, belajar untuk menjadi diri sendiri, belajar untuk melakukan, belajar untuk mencapai kehidupan bersama. Keempat, belajar kontekstual (mengaitkan dengan kehidupan nyata) dengan menggunakan potensi lingkungan sekitar sebagai wahana Pendidikan. Kelima, mengarah kepada tercapainya hidup sehat dan berkualitas, memperluas wawasan dan pengetahuan, dan memiliki akses untuk memenuhi standar kehidupan yang layak.

### **2.2.1.4 Sasaran Pendidikan *Life Skill***

Sasaran *life skill* menurut Anwar (2015:28) yaitu “Anggota masyarakat usia produktif 18-45 tahun, perempuan maupun laki-laki putus sekolah maupun belum bekerja dengan

kriteria memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja, komitmen mengikuti kegiatan, dan domisili warga desa yang berada pada lingkup satu kecamatan.”

#### **2.2.1.5 Tujuan Pendidikan *Life Skill***

Tujuan dari orientasi *life skill* menurut Anwar (2015:31) adalah “Memberikan pengalaman belajar yang berarti bagi peserta didik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari.”

Adapun tujuan pendidikan *life skill* secara khusus bila dirinci adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program-program pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan ketrampilan, keahlian dan kecakapan serta nilai-nilai keprofesian untuk mendorong produktivitas sebagai tenaga kerja yang handal atau kemandirian berusaha.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti program khusus berbasis kompetensi, serta fasilitasi penempatan kerja pada dunia usaha/industri dan/atau berusaha mandiri.

#### **2.2.2 Kajian tentang Lembaga Pemasyarakatan**

Kajian tentang Lembaga Pemasyarakatan di dalamnya akan membahas tentang definisi, tujuan, fungsi, dan asas yang melandasi Lembaga Pemasyarakatan.

##### **2.2.2.1 Definisi Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.”

### **2.2.2.2 Tujuan Sistem Pemasyarakatan**

Tujuan sistem pemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi:

1. Manusia seutuhnya
2. Menyadari kesalahan
3. Memperbaiki diri
4. Tidak mengulangi tindak pidana
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
6. Berperan aktif dalam pembangunan
7. Hidup secara wajar sebagai warga yang baik, bertanggung jawab.

### **2.2.2.3 Asas yang Melandasi Pemasyarakatan**

Menurut C.I Harsono (1995:3) menjelaskan bahwasanya dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Pemasyarakatan dilandasi oleh asas yang menjadi salah satu bagian integral dari sistem pemasyarakatan, yaitu:

1. Pengayoman
2. Persamaan pelayanan dan perlakuan
3. Pendidikan dan Pembimbingan
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
6. Terjaminnya hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

### **2.2.3 Kajian tentang Warga Binaan Pemasyarakatan**

Kajian tentang Warga Binaan Pemasyarakatan di dalamnya akan membahas tentang definisi, hak, kewajiban, proses penerimaan, penempatan warga binaan, tahap pembinaan, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga binaan.

### **2.2.3.1 Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan**

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa “Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.”

### **2.2.3.2 Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak sebagai berikut:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan layanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. Remisi;



2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3.3 Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan**

Warga Binaan Pemasyarakatan juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
5. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan.

### **2.2.3.4 Proses Penerimaan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Tahapan awal ketika warga binaan dimasukkan ke Lapas maka diperiksa dengan teliti apakah orang yang diantara benar-benar sama dengan yang terdaftar dalam vonis dimana diambil sidik jari tengah kiri dan mencocokkannya dengan yang ada di vonis. Langkah berikutnya menanyakan warga binaan yang bersangkutan tentang namanya, alamatnya, agama, pekerjaan, lama pidana, dan apabila cocok yang terdapat dalam vonisnya maka tugas berikutnya adalah mencatat warga binaan tersebut pada register yang sesuai dengan pidananya,

### **2.2.3.5 Tahap Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Pola pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana, yaitu:

#### 1. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) masa pidana.

#### 2. Tahap lanjutan pembinaan

Tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, meliputi tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga masa pidana).

#### 3. Tahap akhir

Pembinaan ditahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi perencanaan program integrasi dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

### **2.2.3.6 Permasalahan yang dihadapi Warga Binaan Pemasyarakatan**

Pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap narapidana. Dampak psikologis dari pidana penjara antara lain Menurut Harsono (1995) pidana secara psikologis merupakan beban terberat bagi setiap WBP. Dampak psikologis dari pidana penjara antara lain adalah:

1. *Lost of personality*, yaitu hilangnya kepribadian, identitas diri WBP yang diakibatkan peraturan dan tata cara hidup di Lapas/rutan,
2. *Lost of security* yaitu hilangnya rasa aman
3. *Lose of liberty* yaitu hilang kemerdekaan
4. *Lost of personal communication* dimana kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapa pun dibatasi,
5. *Lost of good and service* yaitu kehilangan akan pelayanan
6. *Lost of heterosexual relationship* yaitu hilangnya naluri seks, kasih sayang, rasa aman bersama keluarga dan lawan jenisnya
7. *Lost of prestige* yaitu kehilangan harga diri
8. *Lost of belief* yaitu kehilangan rasa percaya diri
9. *Lost of creativity* yaitu hilangnya kreatifitas bahkan impian dan cita-cita.

#### 2.2.4 Kajian Pekerjaan Sosial dengan Koreksional

Kajian tentang pekerja sosial di dalamnya akan membahas tentang definisi pekerjaan sosial koreksional, tujuan pekerjaan sosial koreksional, fungsi pekerjaan sosial koreksional, dan peran pekerja sosial koreksional.

##### 2.2.4.1 Definisi Pekerja Sosial

Menurut Siporin dalam Fahrudin (2014:61), pekerja sosial adalah “*Social work is defined as a social institutional method helping to prevent their social problems, to restore and increase their social functioning.*”

Pekerja sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial.

#### **2.2.4.2 Pekerja Sosial Koreksional**

Pekerja sosial menurut Rex A. Skidmore (1991:224) "*Correctional of helping person who have violated the law be rehabilitated*". Definisi tersebut menjelaskan bahwa Pekerja Sosial Koreksional adalah proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa proses pertolongan dalam pekerjaan sosial koreksional memfokuskan pekerjaannya pada orang lain dan tingkah laku serta lingkungan sosialnya, serta mempengaruhi tingkah laku dari anggota masyarakatnya.

#### **2.2.4.3 Tujuan Pekerja Sosial Koreksional**

Tujuan Pekerja Sosial di bidang Koreksional yang lebih spesifik mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:15) antara lain sebagai berikut:

1. Membantu narapidana agar dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Membantu klien memahami diri mereka sendiri (narapidana), relasi dengan orang lain, dan harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.
3. Membantu narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Membantu narapidana melakukan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat.
5. Membantu narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain (keluarga, istri/suami, tetangga, dan lingkungan sosial).

#### **2.2.4.4 Fungsi Pekerja Sosial Koreksional**

Sebagai pekerja sosial di bidang koreksional, maka pekerja sosial memiliki fungsinya sebagai pekerja sosial dalam pelayanan koreksional. Berikut fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:20), antara lain:

1. Membantu narapidana memperkuat motivasinya.

2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyalurkan perasaan-perasaannya dan memberikan informasi kepada narapidana.
3. Membantu pelanggar hukum untuk membuat keputusan-keputusan.
4. Membantu narapidana merumuskan situasi yang dialaminya.
5. Memberikan bantuan dalam hal merubah/memodifikasi lingkungan keluarga dan lingkungan dekat.
6. Membantu pelanggar hukum mengorganisasi kembali pola-pola perilakunya dan memfasilitasi kegiatan rujukan.

#### **2.2.4.5 Peran Pekerja Sosial Koreksional**

Peran pekerja sosial pada sistem pemasyarakatan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan (2010:21) antara lain sebagai berikut:

1. *Konselor*, membantu Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan yang diperbuat, menghilangkan perasaan-perasaan yang menekan kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan serta memberikan keyakinan dan bimbingan bagi penyesuaian diri serta memberikan alternatif pemecahan masalah bagi klien.
2. *Motivator*, memberikan dukungan dan menumbuhkan semangat Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka memecahkan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam mengikuti pembinaan yang diselenggarakan.
3. *Expert*, memberikan informasi dan masukan-masukan yang dibutuhkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan masalah.
4. *Therapist*, memberikan langkah-langkah terapi bagi perubahan kepribadian dan perilaku narapidana selama berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
5. *Broker*, berusaha mengkaitkan permasalahan yang dihadapi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan sistem sumber yang dibutuhkan dalam hal ini bertugas

menghubungkan klien dengan lembaga atau pihak lain yang diperlukan klien guna mengatasi masalah serta mencapai keberfungsian sosial.

6. Guru, berkaitan dengan upaya memperkuat kemampuan klien untuk melakukan perubahan dalam situasi masalah.
7. Advokat, peranan advokasi bagi klien yang masih bermasalah dengan hukum dan peradilan.
8. Mediator, perantara dengan berbagai unit dalam Lembaga Pemasyarakatan;
9. Instruktur, mengarahkan dan membimbing klien di dalam kegiatan keterampilan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

### **2.2.5 Kajian Pekerjaan Sosial dengan Kelompok**

Kajian mengenai pekerjaan sosial dengan kelompok akan menjelaskan tentang definisi, tipe-tipe kelompok, dan teknik-teknik kelompok dalam pekerjaan sosial.

#### **2.2.5.1 Definisi Pekerjaan Sosial dengan Kelompok**

Pekerjaan Sosial dengan Kelompok adalah suatu metode pekerjaan sosial yang menggunakan pengalaman kelompok sebagai cara utama untuk membantu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peran sosial, pertumbuhan, atau perubahan di antara anggota kelompok. Para pekerja sosial menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk memahami dan memengaruhi proses kelompok yang terjadi serta memberikan layanan kepada individu dalam kelompok tersebut. Mereka dapat membentuk kelompok baru atau melakukan intervensi pada kelompok yang sudah ada dengan cara yang sesuai agar pengalaman kelompok dapat menciptakan situasi yang membantu setiap anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### **2.2.5.2 Tipe-tipe Kelompok dalam Pekerjaan Sosial**

Menurut Garvin (2011:11), terdapat sembilan jenis kelompok yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial kelompok. Jenis-jenis tersebut meliputi: Kelompok percakapan

sosial: Kelompok ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan dan interaksi sosial antara anggota kelompok. Kelompok rekreasional: Kelompok ini didesain untuk memberikan kegiatan rekreasi dan hiburan kepada anggota kelompok.

1. Kelompok percakapan sosial : Kelompok ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan dan interaksi sosial antara anggota kelompok.
2. Kelompok rekreasional : Kelompok ini didesain untuk memberikan kegiatan rekreasi dan hiburan kepada anggota kelompok.
3. Kelompok rekreasional keterampilan : Kelompok ini menggabungkan kegiatan rekreasi dengan pengembangan keterampilan tertentu, sehingga anggota kelompok dapat belajar sambil bersenang-senang.
4. Kelompok pendidikan : Kelompok ini memiliki fokus pada proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan anggota kelompok.
5. Kelompok sosialisasi : Kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok mengembangkan keterampilan sosial dan integrasi dalam masyarakat.
6. Kelompok penyembuhan : Kelompok ini digunakan sebagai ruang aman bagi anggota kelompok untuk berbagi pengalaman, mengatasi masalah pribadi, dan mencapai penyembuhan emosional.
7. Kelompok pengambilan keputusan dan pemecahan masalah : Kelompok ini fokus pada proses pengambilan keputusan kelompok dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok.
8. Kelompok bantu diri : Kelompok ini beranggotakan individu dengan kebutuhan atau tantangan yang serupa, yang saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

9. Kelompok sensitivitas : Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok encounter, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman diri dan hubungan antar anggota kelompok melalui interaksi yang intens dan tulus.

### **2.2.5.3 Teknik-teknik Pekerjaan Sosial dalam Kelompok**

Menurut Corey (2011), teknik-teknik pekerjaan sosial dalam kelompok dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Persiapan/Pra Kelompok : Pada tahap ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menetapkan tujuan kelompok secara spesifik, yang merupakan alasan-alasan mengapa kelompok tersebut dibentuk. Tujuan kelompok ini biasanya merupakan hal-hal yang ingin dicapai oleh kelompok untuk membantu anggota-anggotanya. Teknik-teknik yang digunakan dalam tahap persiapan atau pra kelompok mencakup:
  - 1.1 Membentuk kelompok
  - 1.2 Merekrut anggota kelompok
  - 1.3 Seleksi anggota kelompok
  - 1.4 Melakukan sesi permulaan
  - 1.5 Merumuskan tujuan kelompok
  - 1.6 Mempersiapkan anggota kelompok agar mendapatkan manfaat yang maksimal dari kelompok
  - 1.7 Mempersiapkan pemimpin kelompok melalui interaksi yang intens dan tulus.
2. Tahap memulai kelompok : Pada tahap awal, dalam sesi pertama, baik anggota kelompok maupun pemimpin kelompok seringkali merasa cemas. Prioritas utama pada tahap ini adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dapat dilakukan dengan berbicara, merumuskan, dan menetapkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku selama kegiatan di dalam kelompok. Penting bagi pemimpin kelompok untuk



membangun hubungan yang baik, karena hubungan yang baik akan efektif dalam membangun kepercayaan.

3. Tahap Transisi : Sebelum kelompok mencapai hasil yang produktif dan bermanfaat, biasanya melalui masa transisi yang penuh tantangan. Pada tahap perubahan ini, anggota kelompok memiliki tugas untuk belajar mengenal, menerima, dan mengatasi kecemasan, penolakan, serta konflik. Teknik-teknik yang digunakan dalam tahap transisi meliputi teknik menghadapi anggota kelompok yang bermasalah.

Menurut Corey, anggota kelompok seringkali menunjukkan perilaku yang sulit terutama pada tahap transisi. Tanggapan awal dari pemimpin adalah untuk mengatur dinamika kelompok. Anggota kelompok mengamati perilaku pemimpin dan sering kali membangun kepercayaan pada pemimpin tersebut. Teknik Mengatasi Konflik Menurut Corey, tahap transisi ditandai dengan adanya konflik dan berbagai reaksi negatif yang menjadi bagian normal dari perkembangan kelompok. Ketika kelompok berada dalam tahap transisi, menciptakan dan menjaga kepercayaan menjadi tugas utama yang terus berlanjut. Salah satu teknik yang dapat digunakan di sini adalah dengan menarik perhatian dari individu yang menjadi sasaran konflik dan memberikan masukan kepada seluruh anggota kelompok.

4. Tahap Bekerja : Ciri khas dari tahap pekerjaan adalah bahwa peserta biasanya aktif dalam melakukan pekerjaan atau mengemukakan tema-tema yang ingin mereka eksplorasi. Anggota kelompok lebih siap dalam mengidentifikasi tujuan dan perhatian mereka, serta telah belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pada tahap ini, anggota telah bekerja sama untuk membangun komunitas yang dipercaya, dan mereka saling menghargai. Hal ini mendorong anggota untuk menjelajahi diri mereka sendiri secara lebih mendalam. Teknik-teknik yang digunakan dalam tahap bekerja meliputi:

- 1.1 Bekerja dengan tema yang muncul

- 1.2 Bekerja dengan emosi yang intens pada semua anggota secara serentak

### 1.3 Bekerja dengan mimpi-mimpi

#### 1.4 Bekerja dengan proyeksi dan masalah lain yang muncul dari kesadaran diri.

Tahap Pengakhiran : Merupakan tahap yang sangat signifikan karena berpengaruh besar terhadap dampak di masa depan. Dalam konteks pekerjaan sosial, pengakhiran sering disebut terminasi. Apabila proses pengakhiran atau terminasi berhasil, anggota kelompok akan lebih mampu menerapkan pelajaran yang didapatkan dari kelompok dalam situasi kehidupan lainnya, bergabung dengan kelompok lain jika diperlukan, dan menyimpan perasaan positif terhadap kelompok tersebut. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam tahap pengakhiran kelompok, yaitu teknik mengakhiri sebuah Dalam mengakhiri sebuah sesi, dapat dilakukan beberapa hal berikut sesi. Meminta anggota kelompok untuk memberikan kesimpulan. Menangani pekerjaan yang masih belum selesai. Menentukan tugas-tugas atau pekerjaan rumah. Membuat ringkasan dari pendapat para anggota. Teknik langkah akhir sebuah kelompok dalam mengakhiri sebuah kelompok, dapat dilakukan beberapa hal berikut: Meninjau kembali pengalaman yang dialami oleh kelompok. Menjelaskan hasil dan rencana yang telah disusun. Membahas rencana untuk masa depan. Menyimpulkan tanggapan pribadi dari anggota kelompok. Membuat kesepakatan atau perjanjian, dan mengevalu